

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*
Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



Nama : Afifah Kumalasari
Nomor Mahasiswa : 04 311 240
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

II.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
II.2 Landasan Teori.....	11
II.3 Hipotesis.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian.....	55
III.2 Variabel Penelitian.....	55
III.3 Definisi Operasional Variabel.....	55
III.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	56
III.5 Populasi dan Sampel.....	57
III.6 Alat Analisis.....	57

BAB IV ANALISIS DATA

IV.1 Deskripsi Data.....	59
IV.2 Analisis Data.....	60
IV.3 Pengujian Hipotesis.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan.....	72
V.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	77
----------------------	-----------

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN**

Nama : Afifah Kumalasari
Nomor Mahasiswa : 04 311 240
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 15 Januari 2008

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Dra. Nur Fauziah, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga skripsi dengan judul: **Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan** dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa Islam sebagai agama yang sempurna di sisi-Nya kepada kita semua. Melalui As-Sunnah yang beliau ajarkan, perekonomian yang berdasar kepada prinsip dan nilai-nilai Islam sampai juga kepada umat Islam masa kini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Asmai Ishak, M.Bus., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Albari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dra. Nur Fauziah, MM., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terwujud. Semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih agung dan mulia.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Ayah dan Ibu serta Kakakku, **Drs. H. Agus Ilham Sudrajat, M.Pd.** dan **Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH. M.Si.** serta **Aulia Adhi Khusna, SH.**, yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, do'a restu, serta bimbingan tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. *"Baru ini yang bisa Ananda persembahkan!!..."*
2. **My Big Family** (Yudhit "bun-ibun", Iqbal "bolly", Anang, Tata, Mb'Atik n family, M'Titut n family, Diaz) makasih atas support dan do'anya sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan spesial buat Yayuk "si boo...d", love u boo..d!!..
3. *Spesial to Alhmad Wicaksono, "makasih y atas kasih sayang, pengertian, kesabaran, serta perhatian dan do'anya.."*. Makasih juga buat Bapak& Ibu di Jakarta atas kasih sayang, do'a dan supportnya.
4. Temen-temen seperjuangan angkatan 2004 Jurusan Manajemen (**Intan, Hera, Aya** "klo g ada kalian, apa jadinya dunia ini? Pasti sunyi senyap..", **Natia, Dini, Wulan, Ika** "semangat teman2ku!!", **Dian, Mira, Rio, Agus, Adit, Indra, Juliuz**, dll.. terima kasih atas kebersamaan dan supportnya dalam menyelesaikan studi ini.
5. Sahabatku (**dinda& ephie**) "saat ketawa dan sedih bareng kalian g akan pernah aku lupain pRENd!!.."
6. Temen-temen baruku (Apip, Izmi, Om Ti, N'ctoy, M'Hang, M'BG, Sugeng, Arlian, Aftori, Opik), "makasih buat kebersamaannya di Krajan. Meskipun hanya beberapa bulan, tapi kalian bisa buat aku ketawa sekaligus sedih!!"
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu didalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan keterbatasan pengetahuan penulis, penulis sangat menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. wr wb.



Yogyakarta, 18 Februari 2008

Penulis

Afifah Kumalasari

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sejak krisis ekonomi pada Juli 1997 lalu melanda Indonesia di bidang ekonomi dan moneter yang disusul krisis kepercayaan dan politik membawa dampak kepada dunia perbankan. Terjadinya krisis dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak pada kesehatan perbankan.

Kesehatan merupakan hal yang penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Demikian halnya dengan perbankan, harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya (Kasmir, 2002). Penilaian kesehatan sangat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatan (Kasmir, 2002). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang

sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, mulai penilaian bulan April digantikan dengan tata cara penilaian berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 kemudian diperbaharui dengan tata cara penilaian berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004.

Dunia perbankan sebagaimana dunia di bidang lainnya adalah pengabdian terhormat bagi kepentingan rakyat. Dunia usaha harus dijauhkan dari praktik-praktik kotor. Terlebih dalam kondisi keterbatasan sumber daya seperti permodalan, akses informasi dan pasar, maka tanpa di pandu oleh etika moral yang kuat, orang akan cenderung menghalalkan segala cara (Hessel Nogi, 2003). Kini banyak pemimpin perusahaan melupakan etika, kepercayaan, integritas dan kejujuran sehingga pemimpin bisnis telah menyadari bahwa tidak ada pilihan lain kecuali bahwa perusahaan mulai melihat *Good Corporate Governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi suatu sistem nilai dan *best practiced* yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan dan menuntut pendekatan holistik dalam penerapannya (Hendra, 2003). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mulai terasa penting ketika terjadi kegagalan beberapa perusahaan berskala besar seperti Enron dan WorldCom, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai Negara, terutama krisis ekonomi di Negara-negara Asia, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya *corporate governance* dalam kegiatan perekonomian.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju ke arah lebih baik, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional dan akhirnya muncul daya saing yang tangguh yang diikuti pulihnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan investor semua regulasi di bidang ekonomi seharusnya beraskan *Good Corporate Governance*. Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor perbankan lebih cepat menyesuaikan diri dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, karena dipacu banyaknya terjadi skandal perbankan akhir-akhir ini. Skandal perbankan yang marak terjadi dalam beberapa waktu ini sempat menurunkan kepercayaan masyarakat akan institusi tersebut. Skandal-skandal besar terjadi pada bank-bank pemerintah yang notabene memiliki sistem pengawasan yang ketat dan berlapis, namun nilai skandalnya jauh lebih besar dari yang terjadi pada bank-bank swasta. Berbagai skandal perbankan tersebut berdampak negatif terhadap eksistensi lembaga perbankan. Analisa banyak pakar mengungkapkan bahwa permasalahan terletak pada tidak diterapkannya secara baik prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Permasalahan lain yang dialami dunia perbankan adalah bahwa praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan perbankan belum melembaga secara utuh seperti halnya banyak bank-bank yang sering dibebani oleh misi politik tertentu serta keterlibatan birokrasi yang berlebihan dalam manajemen

menjadi tidak terelakkan sehingga menyebabkan kinerja perbankan tidak menunjukkan perbaikan signifikan (Hessel Nogi, 2003).

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha, menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditur dan masyarakat. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* didalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan akan baik. Untuk perusahaan perbankan *Good Corporate Governance* adalah suatu mekanisme dari pemilik perusahaan untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan, ini merupakan kombinasi dari hubungan antara pengambil keputusan, eksekutif dan bagian *supervisor*. Pemisahan dari setiap fungsi tersebut akan memperjelas akuntabilitas dan tanggung jawab dari perbankan tersebut.

Dalam perkembangan penyehatan perbankan di Indonesia, implementasi *Good Corporate Governance* merupakan semangat yang terus di usung oleh BPPN dalam mendorong kemajuan penyehatan perbankan di Indonesia karena implementasi *corporate governance* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Di Indonesia usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* tersebut telah dimulai dan hal ini dapat diketahui dari Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang *corporate governance*. Salah satu bukti nyatanya adalah bagaimana Bank Permata yang

pada tahun 2002 membukukan kerugian sampai Rp 808,22 Milyar, namun dengan adanya upaya *Good Corporate Governance* bank tersebut akhirnya mampu membukukan laba hingga Rp 102,29 Milyar pada kuartal I/2003. Hal ini juga membuktikan bahwa di dalam keanekaragaman budaya organisasi (*divergence culture*), seperti kondisi Bank Permata yang merupakan hasil merger bank-bank, ternyata *Good Corporate Governance*-pun bisa diterapkan dengan sukses.

Good Corporate Governance sendiri juga merupakan tata kelola korporasi yang memberikan jaminan atas hasil dari suatu proses dan sistem yang dialami, yang berlandaskan prinsip-prinsip di bawah ini: *Transparency* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dalam setiap korporasi perbankan diharapkan seluruh elemen di dalamnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi apapun risikonya. Namun demikian hal ini perlu kesadaran masing-masing pihak untuk saling memahami kondisi korporasi. *Fairness* ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan minoritas di dalam korporasi perlu mendapat perlakuan yang adil dan perlindungan sebab setiap komponen yang ada dalam korporasi merupakan sumber kekuatan menuju kesuksesan korporasi. *Accountability* merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan wewenang antar *stakeholders* dalam korporasi. Diharapkan, masing-masing *stakeholders* menyadari tugas dan wewenangnya dengan selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. *Responsibility* berarti korporasi perbankan tersebut harus berjalan sesuai

aturan, sistem dan prosedur yang berlaku dan disepakati bersama dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *stakeholders*. *Independency* menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi pedoman bagi para manajer perbankan nasional sebagai kekuatan internal karena implementasi *Good Corporate Governance* yang paling baik adalah bersumber dari keinginan dan kemauan semua pihak di dalam korporasi perbankan sehingga mewujudkan suatu pondasi yang kuat bersaing dikancah yang lebih luas. Tentunya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di atas perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan berkesinambungan.

Beberapa institusi seperti kementerian BUMN, Dirjen pajak, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* telah berupaya untuk mendorong penerapan *Good Corporate Governance* dan meningkatkan kualitas pengungkapan dalam informasi keuangan. Salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada perusahaan *go public* yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunannya (*Annual Report Award*). (Warta Ekonomi, 2002). *Annual Report Award* ini diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan tahunan, khususnya

untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku serta informasi lain yang relevan dengan kebutuhan *stakeholders*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah: **Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia).**

I.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empirik pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembuatan keputusan penyaluran dana bagi calon nasabah bahwa informasi tentang penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting untuk menilai perusahaan. Penelitian di masa datang yang sejenis yang dilakukan oleh

peneliti lain diharapkan mempertimbangkan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai tambahan referensi.

I.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini terselesaikan, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis

Dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat sangat bermanfaat bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik. *Good Corporate Governance* akan menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur dan masyarakat. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan akan baik.

3. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Bagi akademisi, studi tentang penerapan *Good Corporate Governance* sangat menarik untuk dikaji. Penerapan *Good Corporate Governance* banyak dikaitkan dengan disiplin ilmu akuntansi dan keuangan, serta akuntansi berperilaku.

Secara empiris terbukti dengan hasil penelitian McKinsey & Company yang memberi indikasi bahwa para manajer dana di Asia akan membayar 26-30% lebih untuk saham-saham perusahaan dengan *corporate governance* yang baik ketimbang untuk saham-saham perusahaan dengan *corporate governance*-nya yang meragukan. Lebih lanjut hasil penelitian McKinsey menjelaskan bahwa 700 investor menunjukkan 43% memilih menanamkan modalnya pada perusahaan yang tingkat penerapan *Good Corporate Governance* yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Semua ini berarti bahwa negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai *corporate governance* yang baik. Selain itu juga ditemukan bukti tambahan bahwa saham perusahaan yang disurvei menikmati valuasi pasar sampai dengan 10%-12%. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap konsep *Good Corporate Governance* tersebut.

Selanjutnya beberapa studi membuktikan secara empiris bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, et al 1998; Simanjuntak 2002; dan Sukmawati 2004). Sejalan dengan penelitian tersebut, survei yang dilakukan terhadap 189 perusahaan *public* di enam *emerging market* yaitu India, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan dan Turki menunjukkan kaitan yang erat antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai penerapan *Good Corporate Governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Bahkan beberapa pihak menganggap informasi mengenai penerapan *Good Corporate Governance* tersebut lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan (Lukuhay, 2002).

Penelitian mengenai *corporate governance* di Indonesia telah beberapa kali dilakukan. **Sulistyanto dan Nugraheni (2002)** menguji apakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini mengindikasikan belum berhasilnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (*audit committee*) yaitu komponen penting dalam

Good Corporate Governance di Indonesia direspon oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (*information content*) yang menarik minat investor di pasar. Minat pasar ini merefleksikan kepercayaan masyarakat bahwa konsep *Good Corporate Governance* akan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

II.2 Landasan Teori

2.1 Pengertian Bank

Definisi tentang bank dapat dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank dan memerlukan penjabaran karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu:

- 1) *Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.* (Prof. G. M. Velyn Stuart dalam bukunya *Bank Politic*).
- 2) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.* (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

3) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.* (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. *Kedua*, fungsi bank pada umumnya adalah: (1) menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka dan simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga; (2) memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; (3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.2 Sumber Dana Bank

Pengertian dari sumber dana bank adalah kegiatan bank di dalam menghimpun dana. Dana bank dapat bersumber dari: (1) modal sendiri, (2) dana masyarakat dan (3) dana lembaga lainnya.

a. Dana yang bersumber dari Modal Sendiri

Sebagai modal utama dari badan usaha bank adalah dana dari bank bersangkutan yang disebut modal sendiri (ekuitas) dalam pengertian dana

yang diperoleh dari dalam bank tersebut. Penghimpunan dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dana dari para pemegang saham (sebagai pemilik perusahaan), baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.
2. Cadangan, yaitu bagian laba yang setiap tahun disisihkan oleh bank untuk tujuan tertentu.
3. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun lalu maupun laba tahun berjalan tetapi belum dibagikan kepada para pemegang saham (pemilik perusahaan).

b. Dana yang Berasal dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan. Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: simpanan giro, tabungan dan deposito.

1) Simpanan Giro

Dengan memiliki simpanan di suatu bank atau rekening berarti seseorang (nasabah) memiliki sejumlah uang di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk

dititipkan di bank. Dana itu kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Pengertian giro menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan, misalnya keabsahan alat penarikannya.

Pengertian penarikan merupakan pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada di rekening dapat dilakukan secara tunai maupun secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro.

Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang tersebut di dalam cek atau kepada pembawa cek. Dalam hal ini bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek tersebut untuk mengungkapkannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan.

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dana yang cukup
- b. Ada materai yang cukup
- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
- d. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf haruslah sama
- e. Memperhatikan masa kadaluwarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- f. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di *specimen* (contoh tanda tangan)
- g. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
- h. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
- i. *Endorsment* cek benar jika ada
- j. Kondisi cek sempurna tidak cacat
- k. Rekening nasabah belum ditutup

Selain persyaratan di atas, jenis cek juga mempengaruhi cara pencairan dana. Dalam praktik sehari-hari terdapat beberapa jenis cek yang berlaku di masyarakat, antara lain: cek atas unjuk, cek atas nama, cek mundur dan cek kosong.

2) Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,

bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung (deposan). Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang untuk melakukan transaksi (jual beli), tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas.

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dua jenis simpanan di atas.

Untuk mencairkan deposito maka pemilik deposito (deposan) dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis deposito yaitu:

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2 hingga 24 bulan. Deposito

berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, perbedaannya hanyalah bahwa sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain itu pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo.

c. *Deposito on call*

Jenis deposito ini digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya 25 juta dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposit on call* memiliki jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dan paling lama kurang dari 1 (satu) bulan. *Deposit on call* diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*. Namun sebelum *deposit on call* tersebut dicairkan tiga hari sebelumnya depositan terlebih dahulu harus sudah memberitahukan kepada pihak bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan *deposit on call*-nya.

c. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lain

Sumber dana dari lembaga lain (dana pihak kedua) merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan ketiga. Dana yang diperoleh dari sumber ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu. Sumber dana dari lembaga lain di antaranya berasal dari:

- 1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- 2) Pinjaman antar bank (*call money*). Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
- 3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.
- 4) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri.

2.3 Kegiatan Bank

Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada

masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (*loanable fund*). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut *funding*.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional atau berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil untuk bank syariah (bank Islam). Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

2) Menyalurkan Dana Ke Masyarakat (*Lending*)

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*loanable fund*) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional

dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga, juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank syariah didasarkan pada jual beli dan bagi hasil.

Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. Di samping tingkat bunga simpanan, pengaruh tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana tingkat bunga simpanan lebih besar dari tingkat bunga kredit yang diberikan (*loanable fund*), maka terjadilah *negatif spread*.

3) Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan

penyaluran kredit. Produk jasa-jasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah
- b. jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiunan atau hadiah
- c. jasa pengiriman uang (*transfer*)
- d. jasa penagihan (*inkaso*)
- e. jasa kliring (*clearing*)
- f. jasa penjualan mata uang asing (valuta asing)
- g. jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*)
- h. jasa kartu kredit (*bank card*)
- i. jasa *letter of credit* (L/C)

Banyaknya produk jasa yang ditawarkan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing bank. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

2.4 Jenis Bank

Menurut UU No. 147/1967 jenis-jenis bank dapat dilihat dari berbagai klasifikasinya (Thomas Suyatno, 2001:17).

1) *Dilihat dari aspek fungsinya*

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan

- d. Bank Pasar
- e. Bank Lumbung Desa

2) *Dilihat dari aspek kepemilikannya*

a. Bank milik pemerintah

Pada bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperolehnya juga dimiliki oleh pemerintah. Bank pemerintah terdiri dari:

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

b. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas Warga Negara Indonesia. Beberapa bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Bumi Putera
- Bank Muamalat
- Bank Danamon
- Bank Lippo
- Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Contoh bank yang dimiliki koperasi antara lain: Bank Bukopin. Bank koperasi dapat berbentuk:

1. Bank Umum Koperasi
2. Bank Tabungan Koperasi
3. Bank Pembangunan

d. Bank milik swasta asing

Bank milik swasta asing yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas Warga Negara Asing. Beberapa bank swasta asing antara lain:

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of Tokyo
- City Bank
- Hongkong Bank
- Bangkok Bank

e. Bank campuran

Pada jenis bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang

oleh Warga Negara Indonesia. Beberapa bank campuran antara lain:

- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Inter Pacific Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Mitsubishi Bank
- Sumitomo Niaga Bank

3) *Dilihat dari aspek status*

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia. Beberapa bank devisa antara lain:

- Bank Bali
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo

b. Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri. Beberapa bank non devisa antara lain:

- Bank Niaga
- Bank NISP
- Bank Nusantara Parahayang

4) *Dilihat dari aspek cara menentukan harga*

a. Bank Konvensional

Metode yang digunakan oleh bank konvensional adalah:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b. Bank Syariah

Bank syariah (bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasinya, baik

dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

2.5 Pengertian *Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.

Definisi dari *Corporate Governance* atau Tata Kelola Korporasi menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG, 2000) yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan; dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Berdasarkan definisi tersebut nampak jelas bahwa *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) *Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang

saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.

Australia Stock Exchange (ASE), mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate Governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Center for European Policy Studies (CEPS), mempunyai formula lain tentang GCG. GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak di sini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholder* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individu untuk mempengaruhi manajemen, proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut, sedangkan pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

World Bank mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berbagai definisi *Corporate Governance* yang disampaikan di atas, pada prinsipnya memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antar semua pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *stakeholders* lainnya.
- b. Suatu sistem *check and balace* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2.6 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Dalam praktek *Good Corporate Governance* dikenal adanya 5 prinsip utama yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan perusahaan. Keempat prinsip tersebut adalah keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), transparansi (*transparancy*) dan kemandirian (*independency*).

1. Keadilan (*fairness*) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
2. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) berarti kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan

kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

4. Transparansi (*transparency*) dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
5. Kemandirian (*Independency*) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

2.7 Tujuan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian *Good Corporate Governance* yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance*:

- a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- b. melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
- e. meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dapat dimaknakan sebagai rangkaian mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para petaruhnya (*stakeholders*). Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab di antara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Kelola perusahaan yang baik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan,

sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar.

2.8 Manfaat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan dengan diterapkannya *Good Corporate Governance*:

a. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Biaya-biaya inilah yang disebut dengan *agency cost*. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini bisa ditekan serendah mungkin.

b. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Hal tersebut selain dapat memperkuat kinerja keuangan, juga akan membuat produk perusahaan yang dilepas ke pasaran menjadi lebih kompetitif.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham. Hal ini akan terlibat terutama ketika seorang investor bermaksud melakukan investasi untuk jangka waktu yang lama.

d. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena perusahaan sangat mengandalkan kepercayaan dari *stakeholders* atas informasi yang diungkapkannya. Sehingga *stakeholders* mendesak keras agar perusahaan menerapkan konsep pengelolaan yang baik, karena bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* akan kalah dalam persaingan karena dianggap tidak melindungi kepentingan *stakeholder*-nya.

2.9 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan, seberapa besar penghasilan yang diperoleh perusahaan serta transaksi-transaksi ekonomi apa saja yang telah dilakukan perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Secara ringkas, laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan, di mana Neraca

(*Balance Sheet*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan Laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Selain itu dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari suatu perusahaan, akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan mengadakan analisa data keuangan dari tahun-tahun yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan tersebut, diusahakan agar dalam penyusunan rencana untuk tahun-tahun yang akan datang, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki.

Dalam hal ini dihubungkan antara penerapan *Corporate Governance* oleh suatu perusahaan dengan teori-teori dalam pengungkapan laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance*.

Analisis rasio keuangan dapat meliputi dua jenis perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (*rasio historis*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama (*perbandingan internal*). Jika rasio keuangan disajikan dalam bentuk suatu daftar untuk periode beberapa tahun, analisis dapat mempelajari

komposisi perubahan-perubahan dan menetapkan apakah telah terdapat suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan dan prestasi perusahaan selama jangka waktu tersebut. Rasio keuangan juga dapat diperhitungkan berdasarkan laporan proforma atau proyeksi, dan dibandingkan dengan rasio sekarang atau masa lalu.

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan/company ratio) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (rasio industri/ rasio rata-rata/ rasio standard) untuk waktu yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak di bawah rata-rata.

2.10 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada saat tertentu, biasanya 1 (satu) tahun. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan modal) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan.

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat *repurchase agreement (Repo)*. Sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang memungkinkan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri tanpa pos lawan.

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Perhitungan laba rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Cara penyajian perhitungan laba-rugi bank adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban
- b. Unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Di samping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK dan pernyataan ini, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta (*custodianship*) dan penyaluran kredit kelolaan.

5. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang Laporan Arus Kas, harus disusun berdasarkan konsep kas (*Cash Concept*) selama periode laporan.

2.11 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu
2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu
3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank

4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode

2.12 Pihak-Pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank bersangkutan. Selain itu dengan diumumkan laporan keuangan secara luas, maka keadaan manajemen dari bank yang bersangkutan akan diketahui dengan mudah, sehingga bagi calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya.

2. Bagi Pemilik/ Pemegang Saham (*stakeholders*)

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut. Jika dianggap tidak memuaskan maka kemungkinan manajemen yang ada sekarang segera akan diganti dan sebaliknya. Penilaian pemegang saham akan lebih ditekankan pada kemampuan manajemen dalam mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang rasional dan kemampuan

manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung perkembangan usahanya.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, baik bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis tersebut tidaklah mengherankan apabila Bank Indonesia merasa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Bahkan jika perlu akan ikut campur tangan langsung apabila ada suatu bank mengalami berbagai kesulitan yang serius dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para penyimpan dananya.

4. Bagi Perpajakan

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan. Hal ini karena laba bank yang bersangkutan akan terlihat jelas dari laporan laba rugi. Selain dari itu dapat untuk mengukur kewajaran laba atau rugi yang diumumkan tersebut pihak pajak juga akan dapat membandingkan dengan bank-bank lain yang sejenis.

5. Bagi Karyawan

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan

kesejahteraan apabila bank memperoleh keuntungan dan sebaliknya. Hal ini karena bank sebagai perusahaan jasa memang selayaknya kesejahteraan para karyawan harus mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat para karyawan tersebut merupakan faktor produksinya yang utama. Di samping itu dengan mengetahui perkembangan keuangannya para karyawan juga berkepentingan terhadap penghasilan yang diterimanya tiap akhir tahun apakah sudah sepadan dengan pengorbanan yang diberikan kepada bank di mana ia bekerja.

6. Manajemen Bank

Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

2.13 Jenis Rasio Keuangan Bank

Jenis rasio keuangan banyak sekali macamnya karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Demikian pula pengelompokan rasio juga macam-macam. Apabila dilihat dari sumber dari mana rasio itu dibuat, maka rasio-rasio keuangan dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:

1. Rasio-rasio Neraca (Balance sheet ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, acid-test ratio, current assets to total assets ratio, current liabilities to total assets ratio.
2. Rasio-rasio Laporan Rugi & Laba (income statement ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio.

3. Rasio-rasio Antar-Laporan (Inter-statement ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari Neraca dan data lainnya berasal dari Income statement, misalnya assets turnover, inventory turnover, receivables turnover.

Ada pula yang mengelompokkan rasio keuangan dalam rasio-rasio sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara lain: *quick ratio*, *banking ratio* dan *loans to asset ratio*.

1) *Quick Ratio*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih likuid yang dimilikinya. Semakin besar rasio ini semakin besar jaminan bank untuk memenuhi kewajiban lancarnya/ jangka pendeknya.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2) *Banking Ratio/ Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Loan}}{\text{Total Deposit}}$$

3) *Loan to Assets Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan para *debitur* dengan aset bank yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.

$$\text{Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Asset}}$$

2. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur antara lain: *return on assets*, biaya operasi/ pendapatan operasi, *gross profit margin*, dan *net profit margin*.

1) *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. Rumus yang digunakan adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Total Asset}}$$

2) *Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, maka semakin baik kondisi bank tersebut.

$$BO/PO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

3) *Gross Profit Margin*

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Pendapatan Operasi} - \text{Biaya Operasi}}{\text{Biaya Operasi}}$$

4) *Net Profit Margin*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut pendapatannya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Pendapatan operasi}}$$

3. Rasio Solvabilitas (*Capital*)

Rasio solvabilitas sering disebut juga dengan rasio permodalan. Selain untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, rasio solvabilitas juga digunakan untuk mengetahui sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain. Rasio solvabilitas juga digunakan sebagai alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya dan dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisien yang tinggi. Rasio yang dapat diukur antara lain: *capital adequacy ratio*.

1) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Semakin besar nilai rasionya maka makin besar pula posisi modal bank tersebut.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Loans} + \text{Securities}}$$

4. Rasio Risiko Usaha Bank

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai risiko, begitu pula di dalam bisnis perbankan, banyak pula risiko yang dihadapinya. Risiko-risiko ini dapat pula diukur secara kuantitatif antara lain: *deposit risk ratio* dan *interest risk rate ratio*.

1) *Deposit Risk Ratio*

Rasio ini memperlihatkan risiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

$$\text{Deposit Risk Ratio} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Deposit}}$$

2) *Interest Rate Risk Ratio*

Rasio ini memperlihatkan risiko yang mengukur kemungkinan bunga (*interest*) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.

$$\text{Interest Rate Risk Ratio} = \frac{\text{Hasil Bunga}}{\text{Biaya Bunga}}$$

5. Rasio Efisiensi Usaha

Rasio ini untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil

guna. Melalui rasio-rasio keuangan di sini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan.

Rasio-rasio yang digunakan antara lain: *leverage multiplirratio*, *asset utilization ratio*, dan *operating ratio*.

1) *Leverage Multiplier Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank di dalam mengelola aktiva yang dikuasainya, mengingat atas penggunaan aktiva tetap tersebut bank harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tetap.

$$\text{Leverage Multiplier Ratio} = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Total Equity Capital}}$$

2) *Asset Utilization Ratio*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank dalam memanfaatkan aktiva yang dikuasai untuk memperoleh *total income*.

$$\text{Asset Utilization Ratio} = \frac{\text{Operating Income} + \text{Non Operating Income}}{\text{Total Asset}}$$

3) *Operating Ratio*

Rasio ini untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan.

$$\text{Operating Ratio} = \frac{\text{Biaya Operasi} + \text{Biaya Non Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$$

2.14 Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode CAMEL

Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera pada Undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 29, yang isinya adalah:

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Tabel
Penilaian Kesehatan Bank Menurut Metode CAMEL

Faktor Yang Dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	25%
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang dikualifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang dikualifikasikan	25% 5%
3. Manajemen	a. Manajemen umum b. Manajemen modal c. Manajemen aktiva d. Manajemen rentabilitas e. Manajemen likuiditas	25%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap total asset b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5% 5%
5. Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima	5% 5%

1) Penilaian Permodalan

Untuk mengetahui kecukupan modal dihitung *Capital Adequicy Ratio* (CAR)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

- CAR = 0 atau negatif, angka kredit = 0.
- Untuk setiap kenaikan 0,1%, angka kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Kemudian nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk CAR adalah 25%.

2) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Untuk menghitung kualitas aktiva produktif digunakan dua rumus, yaitu:

$$\text{a. BDR} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Penilaian nilai kredit dari rasio tersebut:

- untuk rasio 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0.
- untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Kemudian nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk BDR adalah 25%.

b. Cadangan Penghapusan Aktiva Diklasifikasikan

Cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang merupakan persetujuan pemegang saham yang dilakukan dalam rapat

pemegang saham. Angka kredit rasio penyisihan (cadangan) penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan dihitung sebagai berikut:

- untuk rasio 0 (tidak memiliki PPAP) diberi nilai 0.
- untuk setiap kenaikan 1% dinilai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Kemudian nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk cadangan penghapusan aktiva diklasifikasikan adalah 5%.

3) Penilaian Manajemen

Bank Indonesia telah menyusun 250 pertanyaan untuk penilaian kemampuan manajemen yang terdiri dari:

Jumlah Pertanyaan	Aspek Manajemen yang dinilai	Bobot CAMEL
25 buah	Manajemen permodalan	2,5%
50 buah	Manajemen aktiva	5,0%
125 buah	Manajemen umum	12,5%
25 buah	Manajemen rentabilitas	2,5%
25 buah	Manajemen likuiditas	2,5%
250 buah	Total bobot CAMEL	100,0%

Setiap pertanyaan yang dapat dijawab “ya” (positif) oleh pihak manajemen bank umum, bank tersebut memperoleh angka nilai kredit sebesar 0,4. Hasil penjumlahan setiap jawaban “ya”, akan menentukan angka kredit (credit point) dalam komponen CAMEL. Selanjutnya, angka kredit ini dikalikan dengan bobot CAMEL untuk manajemen adalah sebesar 25%.

4) Penilaian Rentabilitas

Untuk menilai kemampuan memperoleh laba dihitung:

$$a. ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Penghitungan Rasionya:

- untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0.
- untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya, angka kredit ini dikalikan dengan bobot CAMEL untuk ROA sebesar 5%.

$$b. BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Penghitungan Rasionya:

- untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0.
- untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya, angka kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk BOPO adalah 5%.

5) Penilaian Likuiditas

Untuk menjamin likuiditas dihitung:

$$a. LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}} \times 100\%$$

Penghitungan rasionya:

- untuk rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0.
- Untuk setiap penurunan 1% mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Selanjutnya, angka kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk LDR sebesar 5%.

b. Rasio *Net Call Money* terhadap *Current Assets*

Net Call Money merupakan selisih absolut antara volume transaksi *call money* yang diberikan oleh suatu bank umum kepada bank lain dengan volume transaksi *call money* yang diterima oleh bank tersebut dari bank lain. *Current assets* bank terdiri atas kas, giro di Bank Indonesia, serta piutang jangka pendek lainnya yang dapat segera dicairkan bila diperlukan (alat-alat likuid).

Penghitungan rasionya:

- untuk rasio 100% atau lebih, nilai kredit 0.
- Untuk setiap penurunan 1%, angka kredit ditambahkan 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya, nilai kredit yang diperoleh dengan penghitungan di atas dikalikan dengan bobot CAMEL, untuk rasio *Net Call Money* terhadap *Current Asset* sebesar 5%.

Penjumlahan nilai CAMEL yang telah dikalikan dengan bobotnya masing-masing seperti diuraikan di atas akan diperoleh nilai CAMEL secara keseluruhan. Selanjutnya, nilai CAMEL ini dapat ditambah atau dikurangi dengan angka kredit yang berasal dari penilaian atas pelaksanaan suatu bank

terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pemberian kredit usaha kecil (KUK)
2. Ketentuan tentang pemberian kredit ekspor
3. Ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit
4. Ketentuan tentang posisi devisa neto.

Selanjutnya nilai CAMEL secara keseluruhan yang disebut nilai CAMEL Plus (nilai CAMEL ditambah *reward* atau dikurangi *penalty* atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan) ditetapkan dalam 4 golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - < 81	Cukup sehat
51 - < 66	Kurang sehat
0 - < 51	Tidak sehat

Kemudian apabila berdasarkan nilai kredit dari perhitungan Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, dan Likuiditas (tanpa Manajemen), maka ditetapkan 4 golongan predikat tingkat kesehatan bank, sebagai berikut:

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
60,75 - 75	Sehat
49,5 - < 60,75	Cukup sehat
38,25 - < 49,5	Kurang sehat
0 - < 38,25	Tidak sehat

II.3 Hipotesis

Hipotesis yang ditempatkan dalam penelitian ini secara garis besar adalah:

Ho = Tidak terdapat perbedaan *capital adequacy ratio*, *loan to deposit ratio*, *return on assets*, *rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional* dan *faktor kualitas aktiva produktif* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

Ha = Terdapat perbedaan *capital adequacy ratio*, *loan to deposit ratio*, *return on assets*, *rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional* dan *faktor kualitas aktiva produktif* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan perbankan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia).

III.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. CAR (Capital Adequacy Ratio)
2. KAP (Kualitas Assets Produktif)
3. ROA (Return on Total Assets)
4. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan)
5. LDR (Loan To Deposit Ratio)

III.3 Definisi Operasional Variabel

1). CAR

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga.

2). KAP

Rasio cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang merupakan persetujuan pemegang saham yang dilakukan dalam rapat pemegang saham.

3). ROA

Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.

4). BOPO

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank tersebut.

5). LDR

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

III.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder eksternal

yang dipublikasikan. Data sekunder ini berupa laporan keuangan perusahaan dan rasio-rasio perbankan yang dibutuhkan dalam penilaian kesehatan bank. Data sekunder ini didapat dari Bursa Efek Jakarta (BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia).

III.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang dilakukan disini mengambil populasi perbankan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive karena dalam pemilihan sampel nantinya akan dilakukan dengan pertimbangan sampel tersebut dinilai telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara baik melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*), diantaranya Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Bumiputera, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Danamon, Bank Permata.

III.6 Alat Analisis

Dalam teknik analisis penulis menggunakan uji-t beda dua rata-rata sampel yang berhubungan (*t-test paired samples for means*). Penggunaan teknik statistik ini merupakan yang paling tepat dalam penelitian ini karena sampel yang diteliti merupakan sampel yang *paired observation* atau *matched pairs* dan data berbentuk data rasio. Tipe sampel seperti ini adalah sampel

yang berupa satu kumpulan objek sampel tetapi diukur dalam dua keadaan yang berbeda. Dalam sampel yang berupa satu kumpulan objek tetapi diukur dalam dua kondisi yang berbeda, maka keadaannya tidak independen, sebab sampel hanya berasal dari satu kelompok objek saja. Selain semua alasan tersebut, penggunaan *t-test for paired samples* juga mempunyai dua keuntungan lainnya, yaitu:

- a. *t-test for paired samples* tidak harus mengasumsikan bahwa varian dari kedua kelompok data adalah sama, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian homogenitas varian sebelum menerapkan *t-test for paired samples*.
- b. karena sample berasal dari satu kelompok saja (dengan dua kali pengukuran/ repeated measures), maka metode statistik ini lebih baik dalam pendekatan yang ada dengan sebanyak mungkin mengurangi.

BAB IV

ANALISIS DATA

IV.1 Deskripsi Data

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa laporan keuangan perbankan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan modal yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang akan diteliti. Sedangkan analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik.

IV.2 Analisis Data

IV.2.1 Analisis Data Deskriptif

Analisis deskriptif ini dilakukan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan melalui data sekunder eksternal yang dipublikasikan, yang berupa laporan keuangan dan rasio-rasio perbankan yang dibutuhkan dalam penilaian bank yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta (BEJ, sekarang: Bursa Efek Indonesia). Data yang disajikan pada analisis berikut meliputi: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Kualitas Assets Produktif (KAP)*, *Return on Total Assets (ROA)*, *Beban Operasional Terhadap Pendapatan (BOPO)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Berikut disajikan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan CAR.

Tabel IV.1. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	CAR		
	Sebelum	Saat	Perubahan
Bumi Putera	8.58	5.35	Menurun
Danamon	6.76	6.06	Menurun
Lippo	3.26	2.99	Menurun
Mandiri	1.70	4.03	Meningkat
BNI	5.61	5.36	Menurun
Niaga	3.27	2.62	Menurun
Permata	4.48	3.92	Menurun
BRI	6.21	5.54	Menurun
BCA	1.28	1.07	Menurun

b. Kualitas Asset Produktif (KAP)

KAP atau rasio cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang merupakan persetujuan pemegang saham yang dilakukan dalam rapat pemegang saham. Berikut disajikan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan KAP.

Tabel IV.2. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan KAP Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	KAP		
	Sebelum	Saat	Perubahan
Bumi Putera	1.15	2.35	Meningkat
Danamon	16.11	52.83	Meningkat
Lippo	9.30	7.20	Menurun
Mandiri	14.30	10.28	Menurun
BNI	5.52	8.41	Meningkat
Niaga	4.08	3.17	Menurun
Permata	4.84	3.83	Menurun
BRI	8.42	7.51	Menurun
BCA	1.74	1.58	Menurun

c. *Return on Total Asset* (ROA)

ROA mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. Berikut disajikan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan ROA.

Tabel IV.3. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	ROA		
	Sebelum	Saat	Perubahan
Bumi Putera	1.18	0.31	Menurun
Danamon	2.98	5.74	Meningkat
Lippo	-0.98	0.94	Meningkat
Mandiri	2.32	2.93	Meningkat
BNI	2.00	0.74	Menurun
Niaga	0.34	2.04	Meningkat
Permata	1.87	1.69	Menurun
BRI	3.92	5.35	Meningkat
BCA	2.90	2.93	Meningkat

d. Beban Operasional Terhadap Pendapatan (BOPO)

BOPO digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Berikut disajikan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan BOPO.

Tabel IV.4. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan BOPO Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	BOPO		
	Sebelum	Saat	Perubahan
Bumi Putera	266.64	670.49	Meningkat
Danamon	228.62	255.08	Meningkat
Lippo	284.01	219.45	Menurun
Mandiri	309.27	248.97	Menurun
BNI	199.69	301.04	Meningkat
Niaga	227.08	286.47	Meningkat
Permata	298.33	409.42	Meningkat
BRI	610.95	351.57	Menurun
BCA	263.91	219.81	Menurun

e. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR digunakan untuk mengetahui kemampuan bank membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Berikut disajikan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan LDR.

Tabel IV.5. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan LDR Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	LDR		
	Sebelum	Saat	Perubahan
Bumi Putera	85.29	84.46	Menurun
Danamon	76.20	81.69	Meningkat
Lippo	71.42	67.29	Menurun
Mandiri	71.85	70.32	Menurun
BNI	75.05	75.63	Meningkat
Niaga	88.49	89.83	Meningkat
Permata	77.01	83.60	Meningkat
BRI	70.14	75.41	Meningkat
BCA	73.63	76.59	Meningkat

Tingkat kesehatan dengan metode CAMEL (nilai kredit Camel), pada masing-masing bank, sebelum dan saat Penerapan *Corporate Governance* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.6. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Nilai Kredit Camel, Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Bank	Sebelum		Saat	
	Nilai Kredit CAMEL	Predikat	Nilai Kredit CAMEL	Predikat
Bumi Putera	62.90	Sehat	53.54	Cukup Sehat
Danamon	31.22	Tidak Sehat	31.20	Tidak Sehat
Lippo	38.54	Kurang Sehat	45.85	Kurang Sehat
Mandiri	33.50	Tidak Sehat	41.59	Kurang Sehat
BNI	51.15	Cukup Sehat	42.82	Kurang Sehat
Niaga	50.10	Cukup Sehat	55.78	Cukup Sehat
Permata	52.49	Cukup Sehat	54.49	Cukup Sehat
BRI	45.36	Kurang Sehat	47.16	Kurang Sehat
BCA	58.61	Cukup Sehat	58.91	Cukup Sehat

IV.2.2 Analisis Statistik

Analisis data pada penelitian ini digunakan uji-t beda dua rata-rata sampel yang berhubungan (*t-test paired samples for means*). Analisis data digunakan bantuan *software* komputer, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan analisis, serta mempermudah proses analisis. Berikut disajikan rerata dan standart deviasi pada masing-masing variabel penelitian.

Tabel IV.7. Rerata dan Standart Deviasi Data Penelitian

Data Variabel Penelitian	N	Rerata \pm SD	
		Sebelum Penerapan	Saat Penerapan

CAR	9	0,0457 ± 0,0243	0,0410 ± 0,0165
KAP	9	0,0727 ± 0,0525	0,1080 ± 0,1604
ROA	9	0,0184 ± 0,0148	0,0252 ± 0,0194
BOPO	9	2,9872 ± 1,2242	3,2914 ± 1,4229
IDR	9	0,7656 ± 0,0632	0,7831 ± 0,0719

Berdasarkan jumlah kasus (N), rerata dan standart deviasi tersebut di atas, diperoleh t hitung sebagai berikut:

Tabel IV.8. Hasil *t-test Paired* Sebelum dan Saat Penerapan *Corporate Governance*

Variabel Penelitian	df	t _{hitung}	t _{tabel} t.s. 5%
CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	8	1,002	1,860
KAP (Kualitas Asset Produktif)	8	-0,839	1,860
ROA (<i>Return on Total Assets</i>)	8	-1,508	1,860
BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan)	8	-0,508	1,860
LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>)	8	-1,449	1,860

IV.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada bagian ini adalah: “terdapat perbedaan *capital adequacy ratio*, kualitas asset produktif, *return on total assets*, beban operasional terhadap pendapatan, dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis asli atau alternatif (H_a), untuk keperluan pengujian hipotesis, hipotesis tersebut diubah menjadi hipotesis nihil (H₀), sebagai berikut: “tidak terdapat perbedaan *capital*

adequacy ratio, kualitas asset produktif, *return on total assets*, beban operasional terhadap pendapatan, dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*”.

IV.3.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

1. Hipotesis

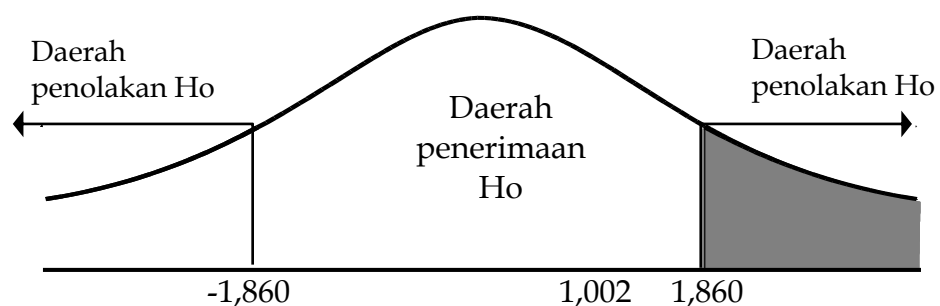
$$H_0 : A_1 = A_2$$

Tidak terdapat perbedaan *capital adequacy ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

$$H_a : A_1 \neq A_2$$

Terdapat perbedaan *capital adequacy ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

2. Dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = 8$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,860, sedangkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar 1,002.
3. Gambar kurva distribusi yang menunjukkan batas daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar V.1. Kurva Distribusi Batas Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 untuk Variabel CAR

4. Karena nilai $t_{hitung} = 1,002 < t_{tabel} = 1,860$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan *capital adequacy ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

IV.3.2 Kualitas Asset Produktif (KAP)

1. Hipotesis

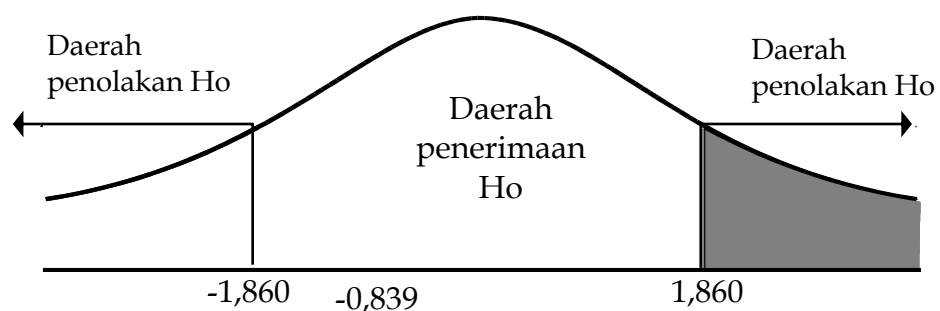
$$H_0 : B_1 = B_2$$

Tidak terdapat perbedaan kualitas asset produktif sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

$$H_a : B_1 \neq B_2$$

Terdapat perbedaan kualitas asset produktif sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

2. Dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = 8$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,860, sedangkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar -0,839.
3. Gambar kurva distribusi yang menunjukkan batas daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar V.2. Kurva Distribusi Batas Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 untuk Variabel KAP

4. Karena nilai $t_{hitung} = -0,839 < t_{tabel} = 1,860$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan kualitas asset produktif sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

IV.3.3 Return on Total Asset (ROA)

1. Hipotesis

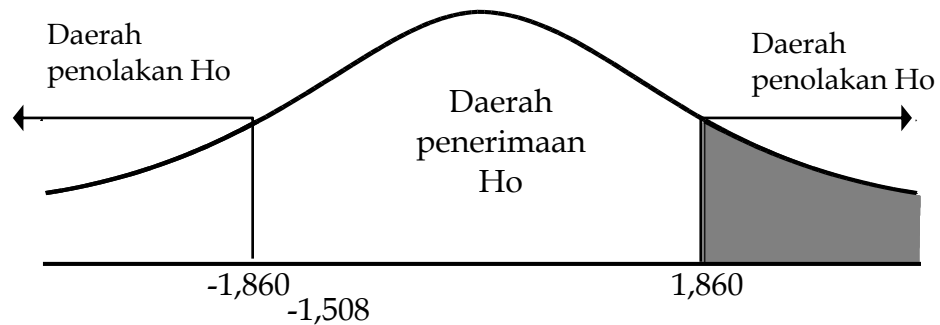
$$H_0 : C_1 = C_2$$

Tidak terdapat perbedaan *return on total assets* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

$$H_a : C_1 \neq C_2$$

Terdapat perbedaan *return on total assets* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

2. Dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = 8$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,860, sedangkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar -1,508.
3. Gambar kurva distribusi yang menunjukkan batas daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar V.3. Kurva Distribusi Batas Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel ROA

4. Karena nilai $t_{hitung} = -1,508 < t_{tabel} = 1,860$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan *return on total assets* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

IV.3.4 Beban Operasional Terhadap Pendapatan (BOPO)

1. Hipotesis

$$H_0 : D_1 = D_2$$

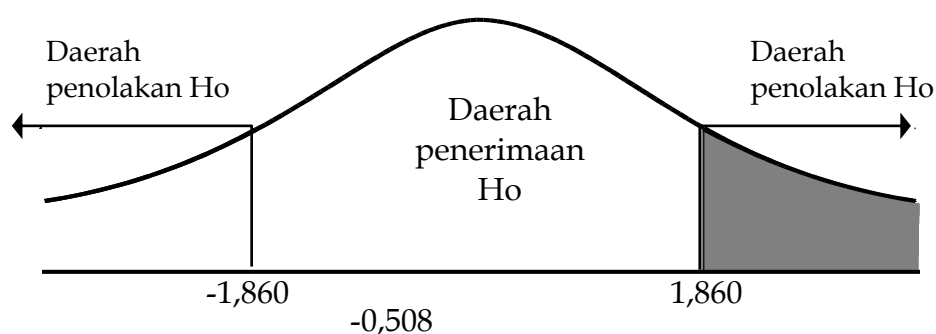
Tidak terdapat perbedaan beban operasional terhadap pendapatan sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

$$H_a : D_1 \neq D_2$$

Terdapat perbedaan beban operasional terhadap pendapatan sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

2. Dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = 8$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,860, sedangkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar -0,508.

3. Gambar kurva distribusi yang menunjukkan batas daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar V.4. Kurva Distribusi Batas Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 untuk Variabel BOPO

4. Karena nilai $t_{hitung} = -0,508 < t_{tabel} = 1,860$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan beban operasional terhadap pendapatan sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

IV.3.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)

1. Hipotesis

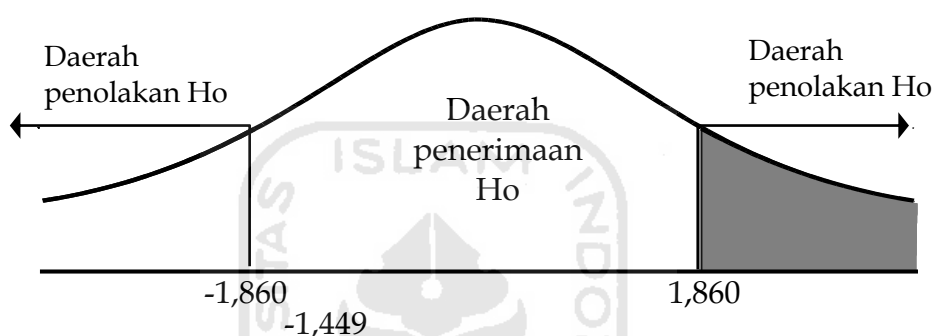
$$H_0 : E_1 = E_2$$

Tidak terdapat perbedaan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

$$H_a : E_1 \neq E_2$$

Terdapat perbedaan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*

2. Dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = 8$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,860, sedangkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah sebesar -1,449.
3. Gambar kurva distribusi yang menunjukkan batas daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar V.5. Kurva Distribusi Batas Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 untuk Variabel LDR

4. Karena nilai $t_{hitung} = -1,449 < t_{tabel} = 1,860$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan *capital adequacy ratio*, kualitas asset produktif, *return on total assets*, beban operasional terhadap pendapatan, dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil tersebut ditunjukkan dari t_{hitung} semuanya kurang dari t_{tabel} pada tarif signifikan (α) 5%, baik pada CAR, KAP, ROA, BOPO, maupun LDR. Kesimpulan ini memberikan makna bahwa tidak ada hubungan yang signifikan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan di Indonesia. Dengan diterapkan atau tidak diterapkannya *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan tidak membuat kondisi kesehatan perbankan menjadi semakin baik.

Ketidakpengaruh penerapan *Good Corporate Governance* pada variabel-variabel penilaian kesehatan perbankan mungkin disebabkan karena *Good Corporate Governance* itu sendiri bukanlah suatu peraturan yang wajib dijalankan oleh setiap perusahaan baik itu perusahaan keuangan khususnya perbankan maupun perusahaan non keuangan lainnya. Hal ini disebabkan karena di Indonesia masih banyak perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada

dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain belum adanya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, masyarakat dan pelaku bisnis sendiri pun belum mengetahui betul manfaat dari *Good Corporate Governance* itu sendiri. Padahal semenjak tahun 2000, upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* dan penerapannya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Selama ini *Good Corporate Governance* hanya dipandang sebagai suatu konsep untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Karena pandangan yang seperti itulah menyebabkan belum adanya kesadaran yang muncul dari pihak perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan mereka padahal sekarang ini dunia bisnis menuntut adanya penerapan *corporate governance* pada setiap perusahaan karena prinsip-prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance* baik yang umum ataupun prinsip yang utama pada perusahaan perbankan dapat memberikan suatu nilai tambah pada perusahaan yang bersangkutan dengan memberikan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, masyarakat, pemerintah dan kreditur dapat memantau segala aktifitas yang dilakukan perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatannya.

V.2 Saran-saran

Ada beberapa saran untuk perbankan di Indonesia dalam usaha untuk peningkatan penerapan *Good Corporate Governance*, melalui pendekatan dan pengembangan berikut ini:

1. Harus ada sebuah keyakinan yang mendalam bahwa *Good Corporate Governance* memiliki manfaat yang dapat memberikan kemajuan dan kesuksesan perusahaan.
2. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut disosialisasikan kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan sehingga akan timbul semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ada.
3. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik apabila jangka waktu penelitian lebih diperpanjang minimal 5 tahun sekali sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih konkret atas penerapan mekanisme *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Achmad (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT Triexs Trimacindo.
- Emirzon, Joni (2007). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hanafi, Mamduh. Dan Abdul Hanafi (1995). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kasmir (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2000). *Manajemen Perbankan*. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krismantoro, Dadi, dkk (2004). *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*. Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Kumala Sarry, Suci. dan Mukhtarudin (2005). "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan." *FORDEMA*, Vol. V, No. 2 (November), 1233-1245.
- Martono (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, Rifqi (2006). "Implementasi *Good Corporate Governance* pada Industri Perbankan Menuju Universal Banking." *Aplikasi Bisnis*, Vol. VI, No. 9 (September), 717-727.
- Pambudi, Teguh S. (2005). "Dari mana Menilai *Good Corporate Governance*." *SWA*, Vol. XXI, No. 09 (April-Mei), 50-52.
- Pudjo Muljono, Teguh (1995). *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Riyanto, Bambang (1995). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFPE.
- Siamat, Dahlan (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sukamulja, Sukmawati (2004). "*Good Corporate Governance* di Sektor Keuangan: Dampak *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan." *BENEFIT*, Vol. 8, No. 1 (Juni).

- Sulistiyanto, Sri. dan Meniek S. Prapti (2003). “*Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?*” *EKOBIS*, Vol. IV, No. 1 (Januari), 83-93.
- Tandelilin, Eduardus (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) (2000), *Seputar Komite Audit*. Jakarta.
- Tri Santoso, Ruddy (1996). *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tri Santoso, Ruddy (1995). *Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zulfikar (2006). “Analisis *Good Corporate Governance* di Sektor Manufaktur: Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan.” *BENEFIT*, Vol. X, No. 2 (Desember), 130-141.

